

## **Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan Dan Rasio Ketergantungan Penduduk Terhadap Pendapatan Perkapita Di Pulau Sulawesi Tahun 2014-2023**

Harbun<sup>1</sup>, Syarwani Canon <sup>2</sup>, Bobby Rantow Payu.<sup>3</sup>

Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Gorontalo

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan dan rasio ketergantungan penduduk terhadap pendapatan perkapita di Pulau Sulawesi tahun 2014-2023. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode pendekatan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari badan pusat statistik (BPS), DJKP Kemenkeu 6 provinsi di Pulau Sulawesi. Metode analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan data panel yang terdiri dari data time series dan data cross section dan menggunakan aplikasi eviews.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Alokasi sektor ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan per kapita, yang mencerminkan kontribusi sektor ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi tahun 2014-2023. (2) Alokasi sektor kesehatan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap perubahan pendapatan per kapita di Pulau Sulawesi tahun 2014-2023, yang berarti pengeluaran di sektor ini belum memberikan dampak ekonomi langsung yang terlihat. (3) Alokasi sektor pendidikan berpengaruh negative dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan per kapita Pulau Sulawesi tahun 2014-2023, yang mengindikasikan bahwa investasi di bidang pendidikan belum menghasilkan dampak ekonomi jangka pendek yang nyata. (4) Rasio ketergantungan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan per kapita, mengindikasikan bahwa struktur demografi tertentu dapat memberikan kontribusi positif terhadap produktivitas ekonomi masyarakat di Pulau Sulawesi tahun 2014-2023.

Kata Kunci: ASE, ASK, ASP, RAK, PP, Pengeluaran Pemerintah.

### **Abstract**

This research aims to determine the effect of government spending in the economic, health, education sectors and population dependency ratio on per capita income on Sulawesi Island in 2014-2023. This research is a research method using a quantitative approach. Data comes from secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS), DJKP Ministry of Finance in 6 provinces on Sulawesi Island. This research data analysis method uses multiple linear regression analysis using panel data consisting of time series data and cross section data and using the eviews application.

The results of this research show that: (1) Economic sector allocation has a positive and significant effect on increasing per capita income, which reflects the contribution of this sector in driving economic growth on Sulawesi Island in 2014-2023. (2) The allocation to the health sector has a positive but not significant effect on changes in per capita income on Sulawesi Island in 2014-2023, which means that spending in this sector has not had a direct, visible economic impact. (3) The education sector allocation has a negative and significant effect on the increase in per capita income on Sulawesi Island in 2014-2023, which indicates that investment in the education sector has not

produced a real short-term economic impact. (4) The population dependency ratio has a positive and significant effect on increasing per capita income, indicating that certain demographic structures can make a positive contribution to the economic productivity of society on Sulawesi Island in 2014-2023.

**Keywords:** ASE, ASK, ASP, RAK, PP, Government Expenditures.

Copyright (c) 2025 Harbun

✉ Corresponding author :

Email Address : [harbunkaseng01@gmail.com](mailto:harbunkaseng01@gmail.com)

## PENDAHULUAN

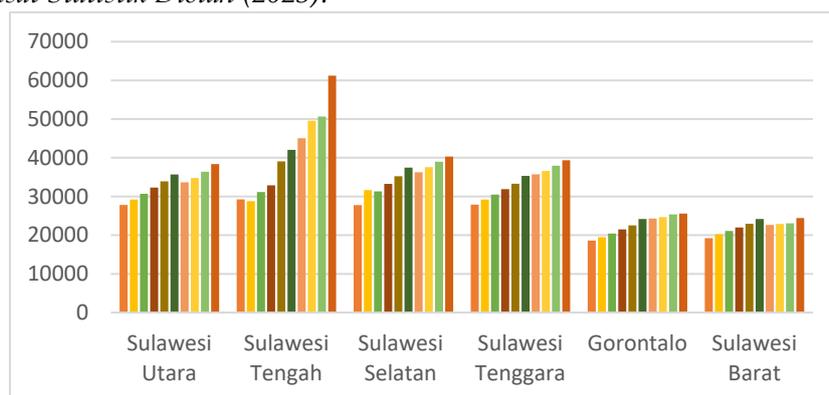
Kesejahteraan penduduk merupakan penilaian akhir dari sebuah pembangunan. Indikator kesejahteraan penduduk dapat dilihat dari tingkat pendapatan yang diukur dengan cara membagi pendapatan nasional secara keseluruhan dengan jumlah penduduk yang ada. Hasil bagi ini disebut sebagai pendapatan perkapita atau pendapatan rata-rata yang diterima oleh masyarakat suatu negara. Semakin tinggi pendapatan perkapita suatu negara, semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat dan sebaliknya (Amra Ausri, 2007) dalam (Khotimah, 2020).

Pendapatan nasional sebagai total biaya ekonomi negara untuk menghasilkan barang dan jasa tahunan. Pendapatan nasional sama dengan biaya faktor nasional yang merupakan jumlah dari upah, sewa, bunga, dan keuntungan yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Sedangkan pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya dihitung dalam jangka waktu satu tahun dalam dalam (Khotimah, 2020).

Kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan perusahaan bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat. Apabila keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu tahun dihitung maka akan diperoleh produk nasional atau pendapatan nasional. Barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dinyatakan dalam unit yang berbeda-yaitu ada dalam ton, barel, helai, dan sebagainya, dan dalam bentuk sederhana nya dinyatakan dalam dalam satuan nilai uang. Dengan demikian, produk nasional atau pendapatan nasional adalah nilai barang akhir dan jasa akhir yang dihasilkan suatu negara dalam suatu tahun tertentu dalam (Caesaktiti et al., 2021).

Berikut Data Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Ribuan Rupiah) di Pulau Sulawesi Tahun 2014-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Diolah (2023).



**Gambar 1. 1 Data Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Di Pulau Sulawesi Tahun 2014-2023**

Berdasarkan gambar diatas Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Ribuan Rupiah) dari tahun 2014-2023 Sulawesi Tengah mengalami fluktuasi dari tahun 2014 berada 29240,17 Juta

Rupiah meningkat lebih laju pada pada tahun 2021 yakni 49587,96 Juta Rupiah dan Provinsi memiliki Pendapatan Perkapita ADHK terendah dalam pada 2014-2023 yakni Provinsi Gorontalo pada tahun 2014 sebesar 18622,43 Juta Rupiah dan pada tahun 2023 sebesar 25580,32 Juta Rupiah dan yang Terendah kedua adalah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2014 Pendapatan Perkapita Menurut ADHK sebesar 19232,05 Juta Rupiah dan Pendapatan Perkapita ADHK Tahun 2023 sebesar 24403,84 Juta Rupiah.

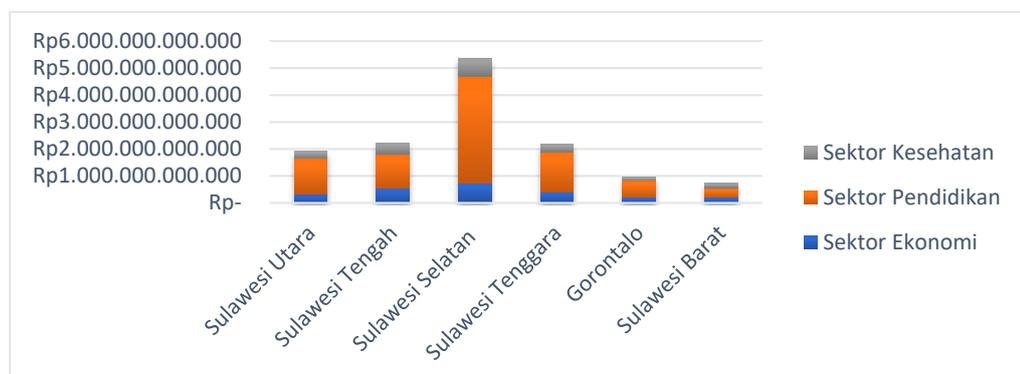
PDRB perkapita secara sistematis dihitung dengan membagi PDRB riil atau nominal dengan jumlah penduduk per tahun. PDRB perkapita tidak semata-mata mengindikasikan kemakmuran wilayah karena pada kenyataannya distribusi pendapatan suatu wilayah masih belum merata. Ada kelompok masyarakat yang memperoleh pendapatan tinggi, tetapi ada pula yang pendapatannya masih rendah. Meskipun PDRB perkapita suatu wilayah tinggi, tetapi tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk juga masih tinggi maka wilayah tersebut belum dapat dikatakan mengalami makmur atau sejahtera.

Jika dibandingkan dengan pulau Sumatera, pendapatan perkapita di Pulau Sulawesi memiliki nilai yang lebih kecil. Pendapatan perkapita di Pulau Sumatera tertinggi ada di Provinsi Riau yang memiliki pendapatan perkapita mencapai 83 070,74 juta rupiah Tahun 2023 sedangkan pulau Sulawesi pendapatan perkapita tertinggi tahun 2023 sebesar 61234,12 juta rupiah di Provinsi Sulawesi Tengah (BPS, 2023).

Begitupun di Pulau Jawa, Provinsi DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan pendapatan kapita terbesar di Pulau Jawa yakni sebesar 192133,13 juta rupiah. Hal ini menandakan bahwa kinerja ekonomi yang ada pada Pulau Jawa jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi yang ada pada Pulau Sulawesi. Padahal dari segi geografis pulau ini menjadi pulau terluas kelima setelah pulau Sulawesi (BPS, 2023).

Pemerintah telah mengklasifikasikan anggaran belanja negara menurut fungsinya. Diantaranya adalah Sektor Ekonomi, Sektor Kesehatan, dan Sektor Pendidikan. Ketiga sektor ini dipandang sebagai tujuan pembangunan yang paling mendasar di suatu wilayah dan mempunyai pengaruh terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yaitu pada fungsi ekonomi, fungsi kesehatan, dan fungsi pendidikan. Oleh karenanya untuk mendukung ketiga fungsi tersebut diperlukan alokasi anggaran yang tepat yang terangkum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alokasi anggaran yang ada ini diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang dapat dilihat dari PDRB perkapita.

Pengeluaran pemerintah Sektor Ekonomi, Sektor Kesehatan, dan Sektor Pendidikan adalah pengeluaran pemerintah yang terangkum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tingkat provinsi yang dinyatakan dalam satuan miliar rupiah. Berikut Presentase Rata-Rata Alokasi Sektor Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan Di Pulau Sulawesi 2014-2023:



Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Diolah.

### Gambar 1. 2 Presentase Rata-Rata Alokasi Sektor Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan Di Pulau Sulawesi 2014-2023

Berdasarkan gambar di atas tentang presentase rata-rata Alokasi Sektor Ekonomi, Kesehatan, dan Pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa Sektor Ekonomi tertinggi berada pada Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 748,202,592,530 sedangkan sektor ekonomi terendah berada pada Provinsi Sulawesi Barat sebesar 204,845,881,131. Sama halnya pada sektor kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan juga masih tertinggi sebesar 675,874,762,015 sedangkan terendah berada pada Provinsi Gorontalo sebesar 122,720,451,488. Terakhir, Sektor Pendidikan dengan rata-rata andil tertinggi pada sektor ini yakni Provinsi Sulawesi Selatan 3,949,948,846,038 sedangkan terendah yakni sebesar 360,090,508,262 di Provinsi Sulawesi Barat.

Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah merupakan salah satu indikasi keberhasilan kinerja dari pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah senantiasa berhati-hati dalam menentukan arah kebijakan yang akan dilaksanakan bagi daerahnya. Menurut Janaranjana Herath, dkk (2011), ekonomi regional merupakan industri dengan beranekaragam potensi ekonomi pada beberapa sektor yang mempengaruhi keseluruhan pertumbuhan ekonomi, dalam (Kesuma & Utama, 2015)

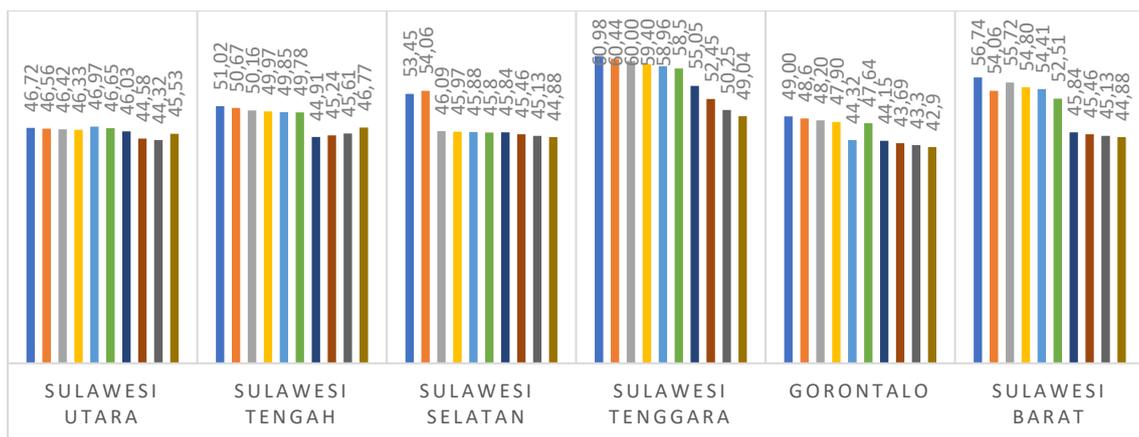
Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk mencapai kehidupan yang layak. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2006), dalam (Suparno, 2015).

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Terkait dengan teori human capital bahwa modal manusia berperan signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi (E.Setiawan, 2006). Sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah melalui pengeluaran pemerintah. Menurut penelitian yang dilakukan Tri Haryanto (2005) menunjukkan bahwa sektor kesehatan, tingkat persalinan yang ditolong tenaga medis dan persentase pengeluaran pemerintah untuk kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kematian balita. Secara umum, kesehatan menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan terbukti cukup besar terhadap peningkatan kinerja sektor tersebut dalam (Suparno, 2015).

Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Angka ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase angka ketergantungan, maka menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan penduduk yang sudah tidak produktif.

Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan penduduk diatas 65 tahun) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Semakin tingginya *prosentase Dependency Ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus di tanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang tidak produktif. Sedangkan persentase angka ketergantungan rendah, maka akan menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan penduduk yang sudah tidak produktif dalam (Hendra, 2018).

Berikut Data Rasio Ketergantungan Penduduk Menurut provinsi di Pulau Sulawesi 2014-2023:



Sumber: Badan Pusat Statistik Diolah (2023).

**Gambar 1. 3 Data Rasio Ketergantungan Penduduk Menurut provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2014-2023**

Berdasarkan gambar diatas bahwa presentase rata-rata Rasio Ketergantungan Menurut provinsi, dengan daerah tertinggi pertama yakni Sulawesi Tenggara sebesar 60.98 persen, diikuti oleh Provinsi Sulawesi Barat sebesar 44.88 persen, sedangkan presentase rasio ketergantungan terendah berada pada provinsi gorontalo sebesar 42.90 persen.

Menurut Arsyad (2010), Tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin cepat di negara-negara sedang berkembang menyebabkan proporsi penduduk yang belum dewasa menjadi bertambah tinggi dan jumlah anggota keluarga bertambah besar. Akibatnya angka beban tanggungan (burden of dependency ratio), yaitu perbandingan antara orang-orang yang belum/tidak sanggup bekerja dengan orang-orang yang ada dalam batas umur turut serta dalam proses produksi. dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi, secara tidak langsung dengan tingginya dependency ratio yang terjadi tidak diimbangi dengan persediaan lapangan pekerjaan maka akan berdampak pada kemiskinan disebabkan jumlah penduduk yang tinggi, jumlah angkatan kerja yang setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga beban ketergantungan yang meningkat dikarekan adanya masalah terhadap pembangunan ekonomi yang menimbulkan gap employment dan jumlah kemiskinan, dalam (Rohana et al., 2017).

Pulau Sulawesi merupakan salah satu Pulau dengan pertumbuhan ekonomi terpesat di kawasan timur Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tersebut didukung oleh sumber daya alam yang melimpah dan lokasi Pulau yang sangat strategis terutama dalam lingkup ASEAN dimana batas utara ini berbatasan langsung dengan Negara Filipina. Dengan adanya akses yang baik, Pulau Sulawesi menjadi gerbang utama di kawasan Timur Indonesia (KTI).

Potensi sumber daya alam yang dimiliki Pulau Sulawesi diantaranya adalah rotan, cokelat, kelapa, jagung, karet, ikan dan barang tambang berupa nikel. Selain potensi sumber daya alam, Pulau ini juga memiliki potensi pariwisata dengan nilai ekonomi tinggi yaitu pariwisata pantai dan bawah laut seperti kawasan wakatobi di Provinsi Sulawesi Tenggara dan pariwisata bunaken di Sulawesi Utara. Hal ini menjadi daya tarik bagi investor baik lokal maupun mancanegara untuk menanamkan modal di Pulau Sulawesi. Potensi ekonomi yang tinggi tersebut tentu memerlukan dukungan infrastruktur agar aktivitas ekonomi berjalan dengan lancar

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan data panel yang terdiri dari data *time series* dan data *cross section* dan menggunakan aplikasi eviews. dengan menggunakan data panel dapat membantu peneliti untuk lebih memahami tindakan pelaku ekonomi bukan sekedar antar individu tapi perilaku ekonomi per periode (Prakoso, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Alokasi sektor ekonomi menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap pendapatan per kapita. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi anggaran untuk sektor ekonomi berkontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Semakin besar investasi pemerintah dalam sektor ekonomi, semakin tinggi pendapatan yang diterima individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang menyatakan Pengeluaran Pemerintah Sektor Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan perkapita di Pulau Sulawesi 2014-2023 diterima. Peningkatan alokasi anggaran di sektor ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas (Canon, S., Ibrahim, A., & Sudirman, S., 2023). Investasi pemerintah, seperti di bidang infrastruktur dan perdagangan, juga menarik investasi swasta dan memperluas aktivitas ekonomi, sehingga pendapatan per kapita masyarakat meningkat (Arham, M. A., & Sri Indriyani S. D., 2019). Hal ini menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran sektor ekonomi yang efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Suparno (2015) yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan IPM, baik secara langsung maupun tidak langsung. Peningkatan anggaran di sektor ekonomi, seperti infrastruktur, menciptakan lapangan kerja dan menarik investasi, yang mendorong pertumbuhan ekonomi (Canon, S., Latif, F., Santoso, I. R., & Mopangga, H., 2024). Penelitian Arfiyansyah (2018) juga mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah untuk pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM melalui peningkatan PDRB per kapita. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran yang efektif sangat penting untuk meningkatkan pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat.

### 1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Pendapatan Per Kapita Di Pulau Sulawesi Tahun 2014-2023

Alokasi sektor kesehatan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pendapatan per kapita. Ini menunjukkan bahwa meskipun pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan penting, peningkatan alokasi untuk sektor tersebut tidak secara langsung meningkatkan pendapatan per kapita. Meskipun masyarakat mungkin merasakan manfaat dalam hal peningkatan kualitas hidup, pengeluaran di sektor kesehatan tidak berdampak langsung pada peningkatan pendapatan. Oleh karena itu, hipotesis kedua yang menyatakan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Perkapita di Pulau Sulawesi 2014-2023 ditolak.

Menurut Dewi (2019), kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang esensial bagi setiap individu, karena dengan kesehatan yang baik, seseorang dapat berkontribusi secara maksimal dalam aktivitas ekonomi. Kesehatan yang optimal mendukung produktivitas kerja dan kualitas hidup, yang pada gilirannya berperan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu negara. Jika masyarakat tidak sehat, hal ini akan menghambat aktivitas ekonomi, menyebabkan penurunan produktivitas, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi (Sintong Afriyansyah, 2016).

Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan mengacu pada anggaran yang dialokasikan secara khusus untuk memenuhi berbagai kebutuhan di bidang kesehatan, termasuk penyediaan fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan layanan kesehatan masyarakat (Arham, M. A., & Payu, B.

R., 2022). Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan sektor kesehatan berjalan dengan baik dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Salah satu cara untuk memenuhi tanggung jawab ini adalah dengan mengalokasikan dana untuk mendukung operasional lembaga-lembaga kesehatan melalui anggaran yang disediakan, guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah negara (RI, 2020).

Pengeluaran sektor kesehatan lebih berfokus pada manfaat jangka panjang, sehingga dampaknya terhadap pendapatan per kapita tidak langsung terlihat (Canon, S., Badu, R. R., & Akib, F. H. Y., 2020). Selain itu, distribusi anggaran yang kurang merata atau pengelolaan dana yang belum optimal dapat menghambat kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan (Sri Indriyani S. D., 2020). Strategi implementasi yang lebih tepat diperlukan agar dampaknya lebih signifikan.

Sejalan dengan penelitian Mongan (2019) menunjukkan bahwa meskipun sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM, pengeluaran sektor pendidikan tidak signifikan terhadap IPM di Indonesia, sejalan dengan temuan bahwa pengeluaran sektor kesehatan tidak langsung memengaruhi pendapatan per kapita. Hal serupa ditemukan dalam penelitian Eka et al. (2016) yang menunjukkan bahwa meskipun anggaran sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM, dampaknya terhadap PDRB dan pendapatan per kapita di Kalimantan Timur tidak signifikan. Penelitian Suparno (2015) juga menemukan bahwa meskipun sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM, dampaknya terhadap PDRB per kapita tidak signifikan, yang menunjukkan bahwa pengaruh sektor kesehatan terhadap pendapatan per kapita cenderung tidak langsung dan lebih terlihat dalam jangka panjang.

## **2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Pendapatan Per Kapita Di Pulau Sulawesi Tahun 2014-2023**

Alokasi sektor pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan per kapita. Ini menunjukkan bahwa peningkatan anggaran untuk pendidikan tidak memberikan dampak signifikan pada pendapatan per kapita. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti ketidakcukupan implementasi program pendidikan atau tidak adanya hubungan langsung antara pendidikan dan peningkatan pendapatan dalam jangka pendek. Oleh karena itu, hipotesis ketiga Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan perkapita di Pulau Sulawesi 2014-2023, ditolak.

Alokasi anggaran pada sektor pendidikan merupakan bentuk realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan. Investasi terhadap pendidikan mutlak dibutuhkan, maka dari itu pemerintah harus dapat menyediakan sarana dan prasarana serta sistem pendidikan yang baik (Canon, S., & Abdul, I., 2024). Alokasi anggaran pemerintah terhadap sektor pendidikan merupakan bentuk nyata dari investasi sebagai peningkatan produktivitas penduduk (Wibowo, 2016).

Alokasi sektor pendidikan mungkin tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pendapatan per kapita karena dampaknya membutuhkan waktu untuk terlihat. Pendidikan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, namun efeknya baru terasa ketika individu berkontribusi pada produktivitas ekonomi (Payu, B. R., 2021). Selain itu, alokasi anggaran yang tidak efisien atau kurangnya keterkaitan dengan kebutuhan pasar kerja dapat menghambat dampaknya dalam jangka pendek (Payu, B. R., & Canon, S., 2024).

Adapun hasil penelitian dari Mongan (2019) menemukan bahwa pengeluaran sektor pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di Indonesia, yang mungkin disebabkan oleh dampak jangka pendek yang tidak langsung. Penelitian Eka et al. (2016) juga menunjukkan bahwa meskipun anggaran pendidikan berpengaruh positif terhadap IPM, pengaruhnya tidak signifikan, mengindikasikan faktor lain seperti pertumbuhan penduduk yang lebih berpengaruh. Selain itu, Arfiyansyah (2018) menemukan bahwa meskipun pengeluaran pendidikan berpengaruh positif terhadap IPM, pengaruhnya terhadap PDRB per kapita tidak signifikan,

yang menunjukkan bahwa dampak sektor pendidikan terhadap ekonomi membutuhkan waktu lebih lama untuk terlihat.

### 3. Pengaruh Rasio Ketergantungan Penduduk terhadap Pendapatan Per Kapita Di Pulau Sulawesi Tahun 2014-2023

Rasio Ketergantungan Penduduk Menurut United Nation (UN) mengukur perbandingan antara jumlah anak (usia 0-14 tahun) dan penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia kerja (15-64 tahun). Rasio ini terbagi menjadi dua, yaitu Rasio Ketergantungan Penduduk Muda, yang menggambarkan jumlah anak-anak terhadap penduduk usia kerja, dan Rasio Ketergantungan Penduduk Tua, yang menunjukkan jumlah lansia terhadap penduduk usia kerja. Rasio ini penting untuk mengukur dampak perubahan struktur usia penduduk terhadap pembangunan sosial dan ekonomi, serta menentukan kebutuhan dukungan sosial bagi kelompok-kelompok tersebut.

Rasio Ketergantungan Penduduk yang tinggi membebani penduduk usia kerja untuk mendukung anak-anak dan lansia. Tingginya rasio pada kelompok muda memerlukan investasi lebih dalam pendidikan dan perawatan anak (Sri Indriyani S. D., 2022). Penurunan fertilitas dapat menurunkan rasio ketergantungan, namun jika fertilitas terus menurun, rasio ketergantungan akan meningkat akibat bertambahnya proporsi penduduk usia lanjut, yang membutuhkan lebih banyak investasi dalam jaminan sosial dan kesehatan (Sri Indriyani S. D., Canon, S., & Bauty, D. O., 2023).

Rasio Ketergantungan Penduduk menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan per kapita. Ini mengindikasikan bahwa rasio ketergantungan, yang menggambarkan proporsi populasi tidak produktif (seperti anak-anak dan lansia) terhadap populasi produktif, memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan per kapita. Ketika rasio ketergantungan lebih rendah, individu dalam kelompok produktif lebih banyak yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan. Oleh karena itu, hipotesis keempat yang menyatakan bahwa Rasio Ketergantungan Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Perkapita di Pulau Sulawesi 2014-2023, ditolak.

Rasio Ketergantungan Penduduk berpengaruh signifikan terhadap pendapatan per kapita karena semakin rendah rasio tersebut, semakin banyak individu usia produktif yang dapat berkontribusi pada ekonomi (Canon, S., & Abdul, I., 2024). Dengan lebih sedikit anak-anak dan lansia yang bergantung secara ekonomi, lebih banyak tenaga kerja yang tersedia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Sebaliknya, rasio ketergantungan yang tinggi akan menambah beban pada penduduk usia kerja (Payu, B. R., Abdjul, N. N. M. O., & Bumulo, F., 2023).

Penelitian ini sejalan dengan Mongan (2019), yang menunjukkan sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM, dan Khotimah (2020), yang menemukan bahwa pendapatan per kapita dan partisipasi kerja perempuan memengaruhi fertilitas di ASEAN. Arfiyansyah (2018) juga mendukung bahwa pengeluaran sektor pendidikan dan kesehatan meningkatkan IPM, menegaskan bahwa pengurangan rasio ketergantungan dapat meningkatkan pendapatan per kapita.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kesimpulan sebagai berikut:

1. Alokasi sektor ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan per kapita di Pulau Sulawesi. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan anggaran untuk sektor ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, sehingga hipotesis pertama diterima.

2. Alokasi sektor kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan per kapita. Meskipun penting, peningkatan anggaran di sektor ini tidak berdampak langsung pada pendapatan, sehingga hipotesis kedua ditolak.
3. Alokasi sektor pendidikan tidak berpengaruh yang signifikan terhadap pendapatan per kapita. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan anggaran pendidikan tidak langsung meningkatkan pendapatan, sehingga hipotesis ketiga ditolak.
4. Rasio Ketergantungan Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan per kapita. Nilai analisis menunjukkan bahwa rasio yang lebih rendah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan, sehingga hipotesis keempat diterima.

### Referensi :

- Adhitama, R. (2012). Pengembangan Sektor-Sektor Ekonomi Di Tiap Kecamatan Di Kabupaten Magelang. *Economics Development Analysis Journal*, 1(2), 1-9.
- Anggraeni, M. (2023). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Retrieved from <https://journal.student.uny.ac.id/ekonomi/article/download/7207/6859>
- Anwar. (2016). Pengembangan Sumber Daya Manusia, Yakni Guru Yang Dilakukan Oleh Kepala Sekolah Dan Pengaruh Yang Diperoleh Dari Pengembangan Tersebut Terhadap Kinerja Guru Sd Baik Negeri Maupun Swasta Se-Kecamatan Pangkalan Kurasan Kabupaten Pelalawan. *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim*, 08(Economic Islam), 1-23.
- Arfiyansyah, S. (2018). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto Di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(4), 270-283.
- Arham, M. A. (2014). Desentralisasi Fiskal dan Perubahan Struktur Ekonomi: Studi Perbandingan Kawasan Sulawesi dan Jawa. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 18(4), 431-451.
- Arham, M. A., & Sri Indriyani S. D., (2019). Analysis of Funding, Education Performance, and Economic Growth in Indonesia. *Jurnal Economia*, 15(2), 292-305.
- Arham, M. A., & Payu, B. R. (2022). An Analysis of Government Expenditure on Education, Health, and Infrastructure Sectors on Poverty Reduction in the Tomini Bay. In *2ND INTERNATIONAL CONFERENCE IN SOCIAL SCIENCE (ICONISS) 2021*.
- Badan Pusat Statistik Dalam Angka 2014-2023 Masing- Masing Provinsi Di Sulawesi Data Rasio Ketergantungan Penduduk 6 Provinsi di Pulau Sulawesi tahun 2014-2023.
- Bunna, O. T. (2018). Pengaruh Perencanaan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Yang Dimoderasi Oleh Komitmen Organisasi Pada Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara. *Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar* 2022.
- Caesaktiti, W. H. A., Rusdarti, R., & Oktavilia, S. (2021). Peran Gender Gap Memoderasi Rasio Ketergantungan, Pdrb, Belanja Publik Terhadap Ipm Jawa Tengah 2016-2020. *Business And Economic Analysis Journal*, 1(2), 122-133.
- Canon, S., & Abdul, I. (2024). Analisis Pengaruh Pengeluaran Perkapita, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia Tahun 2010-2019. *Jurnal Studi Ekonomi dan Pembangunan*, 1(3).
- Canon, S., Badu, R. R., & Akib, F. H. Y. (2020). The impact of economic growth and unemployment rate on poverty in sulawesi. *Jambura Equilibrium Journal*, 2(1).
- Canon, S., Ibrahim, A., & Sudirman, S. (2023). Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pengembangan BUMDes Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Journal of Economic and Business Education*, 1(2), 193-201.
- Canon, S., Latif, F., Santoso, I. R., & Mopangga, H. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Daerah Terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah Se-Sulawesi Tahun 2013-2022. *Jurnal Studi Ekonomi dan Pembangunan*, 1(3).
- Eka, A., Eny, R., & Yana, U. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan....

- Dan Kesehatan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Serta Indeks Pembangunan Manusia Di Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Keuangan, Dan Manajemen*, 12(2), 0216–7786.
- Ginting, A. M., & Rasbin. (2010). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Sebelum Dan Setelah Krisis. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 2(1), 279–312.
- Hendra. (2018). Analisis Pengaruh Variabel Kependudukan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur. *Samarinda : Universitas Mulawarman*, 1–13.
- Kesuma, N. L. A., & Utama, I. M. S. (2015). Analisis Sektor Unggulan Dan Pergeseran Pangsa Sektor-Sektor Ekonomi Kabupaten Klungkung The Analysis Of Economic Leading Sector And Shift Share Of Economic Sectors In Klungkung Regency. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8(1), 169–179.
- Kemenkeu RI (2017-2021) APBD Masing-Masing Provinsi Data Alokasi Publik, Di Provinsi Sulawesi
- Kementerian Keuangan. (2023). Dampak Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Retrieved from [https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Dampak\\_pengeluaran\\_pemerintah\\_terhadap\\_pertumbuhan\\_ekonomi.pdf](https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Dampak_pengeluaran_pemerintah_terhadap_pertumbuhan_ekonomi.pdf)
- Khotimah, N. D. (2020). Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, Pendidikan, Rasio Kebergantungan Penduduk, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Fertilitas Di Asean.
- Litbang, B. P. D. (2017). Penyusunan Analisa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Malang. *Laporan Akhir Tahun*.
- Mongan, J. J. S. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 163–176.
- Payu, B. R. (2021). Pemberdayaan Masyarakat melalui Edukasi Pengelolaan BUMDes dan Sumber Daya Desa sebagai Pilar PPKM (Penggerak Perekonomian Kawasan Masyarakat) Perdesaan pada Masa Pandemi. *Mopolayio: Jurnal Pengabdian Ekonomi*, 1(1), 79-83.
- Payu, B. R., Abdjul, N. N. M. O., & Bumulo, F., (2023). Analisis Pengaruh Kebijakan Dana Desa Dan Output Ekonomi Terhadap Kemiskinan Pedesaan Se-Indonesia. *Jurnal Studi Ekonomi dan Pembangunan*, 1(1).
- Payu, B. R., & Canon, S., (2024). Pengaruh Karakteristik Demografi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Sains Regional*, 4 (2), 129-145.
- Prakoso, R. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Terdidik Di Pulau Jawa Tahun 2010-2018. *Jurnal Ilmiah*, 1–12.
- Prasetyo, A. (2016). *Kajian Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Peningkatan Kemacetan Lalu Lintas Di Perkotaan*. 18(4), 231–242.
- Rahajeng, P. (2017). *Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Budgetary Slack Dengan Pertimbangan Etika Sebagai Variabel Moderasi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jombang*. 1–7.
- Ri, B. (2020). Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia. *Demographic Research*, 1, 4–7.
- Rohana, R., Junaidi, J., & Prihanto, P. H. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Dan Rasio Ketergantungan Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Sarolangun. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 6(2), 69–79.
- Sri Indriyani S. D., Canon, S., & Bauty, D. O. (2023). Analisis Pengaruh Rls, Pengeluaran Perkapita, Uhh, Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Kbi Dan Kti. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 6(1), 535-544.
- Sri Indriyani S. D., (2020). Dampak Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Provinsi Gorontalo Tahun 2008-2017. *Jurnal Keseimbangan Jambura*, 2(1), 7-16
- Sri Indriyani S. D. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Sulawesi. *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 4(2), 101-111.
- Suparno, H. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan Dan Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan....

Infrastuktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Timur. *Journal Of Innovation In Business And Economics*, 5(1), 1.